



# RENCANA AKSI TA 2019

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum  
Wilayah Sumatera



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2019



## **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Aksi (RENAKSI) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2019 adalah dokumen rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan kegiatan yang diprioritaskan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera terutama pencapaian Luas Kawasan Hutan yang dilindungi, Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum, Pengaduan Masyarakat, Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dan ditingkatkan penataan perusahaan, Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum, Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas Perkaranya di nyatakan lengkap) dan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi standar minimum. Pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019.

### **I.1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2019 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.



## BAB II RENCANA AKSI

Adapun Sasaran Kegiatan lingkup BPPH LHK Wilayah Sumatera pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TARGET TA 2019 |
|--|---|----------------|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK | Layanan dukungan manajemen satker   | 1 Layanan      |
|  | Layanan perkantoran   | 1 Layanan      |
| Pencegahan dan Pengamanan Hutan                                      | Luas Kawasan Hutan yang dilindungi  | 675000 Hektar  |
|  | Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum                        | 1 Lokasi       |
| Penanganan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi              | Pengaduan Masyarakat  | 250 Pengaduan  |
|  | Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dan ditingkatkan penaatan perusahaan,                            | 125 Izin       |
|  | Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum          | 1 Lokasi       |
| Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan                | Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas Perkaranya di nyatakan lengkap)         | 35 Kasus P-21  |
|  | Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi standar minimum. | 1 Lokasi       |

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan BPPH LHK Wilayah Sumatera TA 2019



### **BAB III PENUTUP**

Tercapainya sasaran Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh kontribusi penuh dari unit kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera serta semua pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian Kegiatan Luas Kawasan Hutan yang dilindungi, Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum, Pengaduan Masyarakat, Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dan ditingkatkan penataan perusahaan, Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum, Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas Perkaranya di nyatakan lengkap) dan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi standar minimum.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta diharapkan agar tujuan program maupun Sasaran Strategis Kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## **BAB IV LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 1 PROGNOISIS CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN BPPH LHK  
WILAYAH SUMATERA TA 2019**

| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TW I    | TW II  | TW III  | TW IV   | TARGET 2019 | SATUAN     |
|---|---------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| Layanan dukungan manajemen satker   | -       | -      | -       | 1       | 1           | Layanan    |
| Layanan perkantoran   | -       | -      | -       | 1       | 1           | Layanan    |
| Luas Kawasan Hutan yang dilindungi  | 200.000 | 75.000 | 200.000 | 200.000 | 675.000     | Hektar     |
| Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum                        | 1       | -      | -       | -       | 1           | Lokasi     |
| Pengaduan Masyarakat  | 70      | 40     | 70      | 70      | 250         | Pengaduan  |
| Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dan ditingkatkan penaatan perusahaan,                            | 35      | 20     | 35      | 35      | 125         | Izin       |
| Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum          | 1       | -      | -       | -       | 1           | Lokasi     |
| Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas Perkaranya di nyatakan lengkap)         | 10      | 5      | 10      | 10      | 35          | Kasus P-21 |
| Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi standar minimum. | 1       | -      | -       | -       | 1           | Lokasi     |



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
**2019**

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK 4 LT 4  
JI. GATOT SUBROTO, DKI JAKARTA 10270